

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda

3.1.1. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Analisis lingkungan internal pada dasarnya merupakan kajian atau identifikasi terhadap kondisi internal organisasi, baik yang menyangkut organisasi, efektivitas organisasi, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana maupun pembiayaan yang ada. Kondisi lingkungan internal ini dapat menggambarkan kekuatan atau kelemahan organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Analisis lingkungan eksternal merupakan kajian atau identifikasi terhadap lingkungan utama organisasi yang menyangkut faktor-faktor sosial, ekonomi, politik maupun teknologi. Kondisi lingkungan eksternal ini dapat menggambarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terhadap pencapaian visi dan misi organisasi yang terdiri dari faktor-faktor pendorong atau mempermudah dikelompokkan sebagai peluang, sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat atau menyulitkan dikelompokkan sebagai ancaman.

Berdasarkan identifikasi maka gambaran kondisi lingkungan internal dan eksternal Bappeda Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan (*Strength*) :

- 1) Peran Bappeda sebagai lembaga perencana sangat luas dan strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan;
- 2) Peran Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah;
- 3) Peran Bappeda sebagai Penyedia dan Pengelola data Pembangunan Daerah
- 4) Tersedianya jumlah pegawai yang memadai;
- 5) Bappeda sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);

b. Kelemahan (*Weaknesses*) :

- 1) Dukungan sarana prasarana dan fasilitas kerja dalam rangka mendukung kinerja lembaga belum memadai;
- 2) Publikasi dan sosialisasi kebijakan rencana pembangunan daerah belum optimal;
- 3) Penggunaan Data dalam perencanaan pembangunan belum optimal
- 4) Tidak adanya pegawai fungsional perencana;
- 5) Fungsi Evaluasi Pembangunan belum optimal;

c. Peluang (*Opportunities*) :

- 1) Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas aparatur perencana
- 2) Kesempatan dalam berkoordinasi, baik secara vertikal maupun horizontal dalam upaya sinkronisasi dan konsultasi rencana pembangunan daerah semakin luas;
- 3) Kemudahan mengakses informasi melalui teknologi informasi
- 4) Terdapatnya lembaga perguruan tinggi yang menjadi mitra dalam kajian ilmiah bagi pengembangan perencanaan pembangunan daerah.
- 5) Ketersediaan dokumen perencanaan dan pedoman/regulasi yang sedang berlaku tentang tata cara perencanaan pembangunan;
- 6) Tuntutan kompetensi aparatur perencana;

d. Ancaman (*Threats*) :

- 1) Adanya indikasi ketidakpedulian (skeptisme) masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
- 2) Pelaksanaan pembangunan rentan terhadap intervensi politik sehingga mengakibatkan terjadinya deviasi antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan;
- 3) Adanya dinamika perubahan regulasi pemerintah dan belum didukung regulasi di tingkat Daerah;
- 4) Kurangnya dukungan dari SKPD dalam hal perencanaan

Selama periode 2011-2015, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga teknis perencanaan pembangunan telah diupayakan secara optimal. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Permasalahan cenderung terjadi dalam hal inkonsistensi antara aspek perencanaan dengan aspek pelaksanaan, bukan dalam hal keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan secara hirarki.

Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan organisasi secara utuh sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2016-2021 akan diprioritaskan kepada pembangunan yang berbasis perdesaan sesuai dengan karakteristik penduduk dan wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

VISI

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 – 2021 adalah:

“KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS ISLAMI, DINAMIS, DAN BERDAYA SAING DI BIDANG AGRIBISNIS BERBASIS PERDESAAN”

MISI

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlaqulkarimah, dan berkualitas.
2. Mewujudkan perekonomian yang tangguh di bidang agribisnis dan pariwisata
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, misi yang berkaitan dengan Tugas pokok dan fungsi Bappeda yaitu terdapat pada Misi 3 dan Misi 4 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Periode 2016-2021. Tugas pokok BAPPEDA “Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang perencanaan umum pembangunan daerah meliputi perencanaan pembangunan fisik, perekonomian, sosial dan pemerintahan, statistik dan pelaporan serta tugas lain yang diberikan Bupati” berkaitan dengan Misi ke 3 adalah “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)” dan Misi ke 4 adalah Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang yang berkelanjutan”.

Tabel 3.2.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BAPPEDA
terhadap Pencapaian Visi dan Misi
Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : “ KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS ISLAMI, DINAMIS, BERDAYA SAING DAN BERBASIS PERDESAAN ”				
No	Misi	Permasalahan Pelayanan BAPPEDA	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlaqulkarimah, dan berkualitas	Belum optimalnya konsep perencanaan pembangunan bidang sosial, pendidikan, kesehatan dan keagamaan yang mendorong	Belum optimalnya konsep perencanaan pembangunan bidang sosial, Pendidikan, kesehatan dan keagamaan	- Banyaknya Pesantren yang tersebar di wilayah Kabupaten Tasikmalaya - Budaya masyarakat Kabupaten

Visi : “ KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS ISLAMI, DINAMIS, BERDAYA SAING DAN BERBASIS PERDESAAN ”

No	Misi	Permasalahan Pelayanan BAPPEDA	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		perbaikan kualitas SDM Kabupaten Tasikmalaya		Tasikmalaya yang Religius islami - Program dan kegiatan yang mendorong peningkatan kualitas masyarakat
2.	Mewujudkan perekonomian yang tangguh di bidang agribisnis dan pariwisata	Belum optimalnya konsep perencanaan pembangunan ekonomi terpadu di Kabupaten Tasikmalaya	Belum adanya Dokumen <i>Master Plan</i> Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya	Potensi sektor ekonomi yang banyak dan beragam dimiliki oleh Kabupaten Tasikmalaya terutama dalam bidang agribisnis dan pariwisata
3.	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Masih rendahnya konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya keterbatasan anggaran - Adanya berbagai kepentingan - Partisipasi dan antusias masyarakat terhadap perencanaan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda sebagai TAPD - Masyarakat semakin kritis terhadap perencanaan pembangunan
4.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan	Belum sesuainya pembangunan infrastruktur dengan rencana tata ruang Kabupaten Tasikmalaya	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Kepentingan stakeholder yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Tasikmalaya - Regulasi tata ruang yang sulit direalisasikan 	Tersedianya dokumen rencana tata ruang dan dokumen infrastruktur wilayah

3.3 Telaahan Renstra BAPPEDA Propinsi Jawa Barat

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat yang diharapkan, maka ditetapkan **Visi** BAPPEDA Propinsi Jawa Barat, yaitu: **“Tercapainya Kualitas dan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat”**, dengan **Misi** sebagai berikut:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, akuntabel, dan transparan;
2. Mewujudkan sinergi tata ruang;
3. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
4. Meningkatkan satu data pembangunan daerah;
5. Mewujudkan sumber daya aparatur Bappeda yang profesional dan memiliki integritas.

Hasil analisis terhadap Renstra Bappeda Propinsi Jawa Barat, Bappeda Kabupaten Tasikmalaya perlu menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda Kabupaten Tasikmalaya yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3.

Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Propinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Visi : “Tercapainya Kualitas dan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat”				
No	Sasaran Renstra Bappeda Provinsi	Permasalahan Pelayanan Pelayanan BAPPEDA	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya sinergi perencanaan antar pelaku pembangunan;	Menurunnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan	Terbatasnya akses masyarakat untuk berperan aktif	Adanya Musrenbang sebagai wadah untuk mengakomodir

Visi : “Tercapainya Kualitas dan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat”

No	Sasaran Renstra Bappeda Provinsi	Permasalahan Pelayanan BAPPEDA	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		terhadap jaminan kapasitas akan direalisasikannya rencana	dalam perencanaan pembangunan di Jawa Barat	aspirasi masyarakat
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;	Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan	Tidak konsistennya antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran	Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan
3.	Meningkatnya kualitas layanan informasi perencanaan pembangunan;	Belum optimalnya pelayanan informasi perencanaan pembangunan	Sarana dan prasarana yang kurang memadai	Tersedianya website Bappeda dan SMS Gateway
4.	Meningkatnya proses perencanaan dan pengendalian yang efektif dan efisien;	Belum dimanfaatkan secara optimal hasil evaluasi dan pengendalian	Proses Perencanaan dan pengendalian pembangunan masih dipengaruhi kepentingan partai politik dan golongan tertentu	Adanya kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
5.	Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang;	Belum dimanfaatkan secara optimal hasil kajian dan penelitian untuk input bagi perencanaan pembangunan daerah	Tidak konsistennya perencanaan tata ruang dengan pelaksanaan	- Adanya dokumen RTRW - Adanya peranan BKPRD dalam penataan ruang
6.	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah;	Masih rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan	Tidak konsistennya antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran	Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan
7.	Meningkatnya pengelolaan data perencanaan pembangunan;	Ketersediaan data untuk kebutuhan perencanaan pembangunan	Adanya perbedaan cara perhitungan,	Adanya koordinasi dan sinkronisasi dari SKPD

Visi : “Tercapainya Kualitas dan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat”

No	Sasaran Renstra Bappeda Provinsi	Permasalahan Pelayanan Pelayanan BAPPEDA	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		belum lengkap	pengumpulan dan pengukuran data	terkait dalam perhitungan, pengumpulan dan pengukuran data
8.	Meningkatnya kreatifitas dan inovasi sumberdaya aparatur Bappeda;	Sumber daya manusia dibidang perencanaan masih perlu ditingkatkan	Rendahnya aparatur yang mengikuti diklat perencanaan	- Kuantitas SDM memadai - Tersedianya anggaran peningkatan kualitas aparatur
9.	Meningkatnya pelayanan kerja yang memadai.	Belum optimalnya penggunaan SOP	Tidak lengkapnya ketersediaan SOP masing-masing kegiatan	Tupoksi Bappeda

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya telah ditetapkan melalui Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya dalamnya memuat arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang ingin dicapai pada tahun 2031 adalah mewujudkan Kabupaten yang maju dan sejahtera berbasis sektor pertanian serta menjaga keharmonisan lingkungan berkelanjutan. Didalam mencapai tujuan penataan ruang tersebut, maka disusun kebijakan dan strategi penataan ruang. Beberapa kebijakan dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya yaitu antara lain :

- Pemantapan lahan sawah beririgasi serta meningkatkan produktivitas pertanian;
- Pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya ;
- Pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumberdaya, dan kegiatan pembangunan berkelanjutan ;
- Pengembangan sistem perkotaan – perdesaan ;
- Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah ;
- Pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam yang mendorong pertumbuhan sosial ekonomi pada wilayah belum berkembang ;
- Pengembangan kawasan permukiman perkotaan dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan dan pembangunan berkelanjutan ; dan
- Peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;

Selanjutnya di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031 termuat mengenai rencana Struktur ruang dan Rencana Pola Ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya, struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya bahwa struktur ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya secara berhierarki meliputi ;

A. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten / Kota atau beberapa Kecamatan, meliputi ;

- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Singaparna ;
 - Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Karangnunggal ;
- B. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp)**, kawasan perkotaan yang kedepannya dipromosikan atau diajukan untuk ditetapkan sebagai PKL, meliputi ;
- Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) Manonjaya ;
 - Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) Ciawi ;
- C. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)**, kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa Desa, meliputi ;
- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Rajapolah, Taraju, Cipatujah, Cibalong, Mangunreja, Bantarkalong, Cikatomas, dan Cineam ;
- D. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)**, sebagai pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar Desa ;

Sedangkan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya mencakup rencana pola ruang kawasan lindung yang ditetapkan seluas 64,35 persen dan rencana pola ruang kawasan budidaya seluas 35,65 persen.

Selanjutnya untuk operasionalisasinya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya perlu dijabarkan ke dalam rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok yang dilengkapi peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan

terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi / berdampak terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan mengamanatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya periode rencana 2011 – 2031 dengan Metode cepat (Quick Self Assesment) dan akan disusun kembali pada penyusunan dokumen revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya TA 2016

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BAPPEDA memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis terkait dengan dinamika lingkungan strategis lembaga/institusi Bappeda Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam misi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Isu strategis untuk Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan dan kompetensi SDM perencana;
2. Perencanaan berbasis Teknologi Informasi;
3. Ketersediaan basis data untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui pengembangan informasi/statistik daerah;
4. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
5. Koordinasi perencanaan pembangunan dengan SKPD;
6. Peran serta para pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah;
7. Peningkatan Kerjasama antar Daerah dalam perencanaan pembangunan;